

REGULATION

TRANSPORT KNOWLEDGE CENTER (TKC) CATALOGUE

CATEGORY: REGULATION

NO	CLASS	AUTHOR	TITLE	EDITION	ISBN	PUBLISHER	CITY	YEAR	KEYWORD
613	REG 340 Und -		Undang-undang Republik Indonesia No. . . tahun . . . tentang sistem transportasi nasional			Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM	Yogyakarta	2004	UU SistranasRancangan
727	REG 620.5 Lem k		Keputusan dewan lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional			Lembaga pengembangan jasa konstruksi	bandung	2001	Keputusan lembaga pengembangan jasa konstruksi
729	REG 346 Kep -		Keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan nomor :kep-299/11/tahun 1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan amdal				Jakarta	1996	Pedoman teknis kajian aspek sosial
730	REG 346.1 Kep -		Keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor: kep 57 /menlh/12/1995 tentang analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor						Analisis mengenai dampak lingkungan usaha
737	REG 346.1 Kem r		Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor			Kantor Menteri Lingkungan Hidup	Jakarta	1995	Analisis
750	REG 351 Kep -		Keputusan Gubernur DIY Nomor 19 tahun 2001 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor(PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) tahun 2001 di Propinsi DIY			Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY	Yogyakarta	2001	Daftar bea balik nama kendaraan bermotor
770	REG 351 Per -		Peraturan pelaksanaan tentang pemerintahan daerah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah			Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia	Jakarta	2001	Peraturan pelaksanaan
773	REG 621 Pem -		Peraturan pemerintah republik indonesia nomor: 26 tahun 1985 tentang jalan						Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
782	REG 351 Pet -		Petunjuk teknis pelaksanaan keppres nomor: 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara			BP. Panca Usaha	Jakarta	1994	Pelaksanaan keppres
783	REG 351 Kep -		Keppres no. 16th. 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara			BP. Panca Usaha	Jakarta	1998	Keppres
784	REG 351 Pet -		Petunjuk teknis pelaksanaan keppres nomor: 18tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah			BP. Panca Usaha	Jakarta	2000	Pelaksanaan Keppres
785	REG 720 Und -		Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang			CV. Eko Jaya	Jakarta	1992	Penataan Ruang
789	REG 350 Pem p		Peraturan daerah kota Yogyakarta nomor: 14 tahun 2002 tentang program pembangunan daerah tahun 2002-2006			Pemerintah kota Yogyakarta	Yogyakarta	2002	Program pembanguna daerah
790	REG 350 Per -		Peraturan daerah Propinsi nusa tenggara barat nomor: 5 tahun 2000 tentang pola dasar pembangunan daerah Propinsi nusa tenggera barat tahun 200- 2005			Pemerintah Propinsi nusa tenggara barat	Mataram	2000	Pola dasar pembangunan daerah
815	REG 629 Kep -		Keputusan menteri perhubungan tentang pelimpahan/penyerahan penyelenggaraan pelabuhan laut (unit pelaksana teknis/satuan kerja) kepada pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/kota			Departemen perhubungan R.I.	Jakarta	2002	Keputusan menteri perhubungan
832	REG 351 Ran -		Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara no: tahun 2001 tentang rencana strategi Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2005			Balitbang Sulut	Manado	2001	rancangan peraturan daerah

REGULATION

833	REG 346 Per -		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara		BAPEDAL	Jakarta	2001	Polusi udara
834	REG 346 Per -		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun		BAPEDAL	Jakarta	2001	Pengelolaan limbah
835	REG 346 Per -		Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun		Bapedal	Jakarta	2001	Limbah berbahaya
836	REG 346 Per -		Peraturan Pemerintah RI nomor 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun		BAPEDAL	Jakarta	2001	Limbah berbahaya
837	REG 346 Per -		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingungan hidup		BAPEDAL	Jakarta	2001	Dampak lingkungan hidup
838	REG 346 Per -		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut		BAPEDAL	Jakarta	2001	Polusi air
839	REG 623 Dep -		Undang-undang RI Nomor 14 tahun 1992 tentang lalulintas dan angkutan jalan beserta peraturan pelaksanaannya		Departemen Perhubungan	Jakarta	1993	UU RI-lalu lintas
840	REG 346 Reg -		Buku Himpunan Reglemen 19 Jilid I, II, III, dan IV		Perusahaan Umum Kereta Api	Bandung	1999	Transportasi Kereta Api
847	REG 350 Gar -		Garis-garis besar haluan pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2000-2004		Pemerintah Sulawesi Selatan	Makassar	2000	GBHN Daerah
851	REG 346 Kep -		Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 214/KPTS/1991 tentang baku mutu lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta		Pemerintah Daerah Propinsi DIY	Yogyakarta	1991	Baku mutu lingkungan
912	REG 629 Kep -		Keputusan direktorat jenderal Perhubungan udara nomor: SKEP/347/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang standar rancang bangun dan/ atau rekayasa fasilitas dan peralatan Bandar Udara		Angkasa Pura I	Jakarta	1999	standar rancang bangun
953	REG 351 Kep -		Keputusan bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional no. KEP-27/MK. 3/8/1994 dan no. KEP-166/KET/8/1994 tentang petunjuk teknis pelaksanaan KEPPRES no 16 tahun 1994 tentang		Bahtera Sindayu	Jakarta	1994	APBN-KEPPRES
954	REG 351 Pre p	Presiden RI	Peraturan Pemerintah RI nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah		DIRJEND Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri	Jakarta	2001	Pajak Daerah
955	REG 621 Pem k		Koreksi lampiran Draft SK-Menteri tentang peranan jalan (A, KP-1, KP-2, KP-3) Edisi 10 Juni 2002		Dinas Bina Marga	Jawa Barat	2001	Data dan petgambar
956	REG 351 Pre u	Presiden RI	Undang-undang RI nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah		Sekretaris Negara RI	Jakarta	2000	Pajak daerahRetribusi daerah
957	REG 351 Und -		Undang-undang RI nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah		Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DATI I Jawa Timur	Jakarta	1997	Pajak daerahRetribusi daerah
958	REG 351.2 Pem p		Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 28 tahun 2002 tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung		PEmerintah Propinsi Kepulauan Bangka Beltung	Bangka	2002	Tata ruang wilayah

REGULATION

959	REG 621 Kep -		Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 411/KPTS/1992 tentang petunjuk praktis pengendalian pelaksanaan proyek di bidang pekerjaan umum untuk para pemimpin proyek/bagian proyek			Departemen Pekerjaan Umum	Jakarta	1997	Petunjuk proyek pekerjaan umum
960	REG 340.308 Bup p	Bupatei Sleman	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor: 20 tahun 2001 tentang program pembangunan daerah Kabupaten Sleman tahun 2001-2004			Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sleman	Jakarta	2001	Pembangunan daerah
961	REG 340.62 Pre p	Presiden RI	Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi			Sekretaris Negara RI	Jakarta	2000	Jasa konstruksi
962	REG 027 Und -		Undang-undang RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi			Sekretaris Negara RI	Jakarta	1999	UU telekomunikasi
963	REG 620 Und -		Undang-undang RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi			Sekretaris Negara RI	Jakarta	1999	UU-Jasa Konstruksi
994	REG 340.62 Tig -		Tiga Undang-Undang. Perkereta Apian, Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Penerbangan Tahun 1992			Yogyakarta		1992	Tiga Undang-Undang
995	REG 351 Per -		Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sumatra Utara Tahun 2001 - 2005			Pemerintah Propinsi Sumatra Utara BAPPEDASU			Rencana Pemeritah
1006	REG 351Kep -		Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Dokumen Lelang Standar Pengadaan Jasa Pemberongan Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum			Departemen Pekerjaan Umum	Jakarta	1998	Pengadaan jasa
1007	REG 308 Per -		Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2004			Pemerintah Propinsi NTT	NTT	2001	pembangunan Daerah
1008	REG 623 Kep -		Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Ankutan Laut			Departemen perhubungan Republik Indonesia	Jakarta	2001	Jaringan transportasi
1188	REG 308 Per -		Perda no. 6 tahun 2001 tentang program pembangunan daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 2001-2005			BAPPEDASU	Sumatera Utara	2001	Pembangunan daerah
1207	REG 340.62 Kep -		Keputusan menteri perhubungan nomor: KM 36 tahun 2003 tentang cetak biru pembangunan perhubungan tahun 2000-2024			Departemen perhubungan	Jakarta	2003	Pembangunan perhubungan
1218	REG 340.623 Dir -		Kumpulan keputusan dan peraturan yang berhubungan dengan pengurusan R. P. T.			Direktorat jenderal perhubungan laut	Jakarta	1995	Pengurusan R.P.T.
1219	REG 340.623 Kep -		Keputusan menteri perhubungan nomor: KM 8 tahun 1999 tentang penyempurnaan keputusan menteri perhubungan nomor km 34 tahun 1996 tentang penetapan standar nasional indonesia di bidang transportasi laut			BAPPEDA	Jakarta	1999	Transportasi laut
1220	REG 340.621 Kep t		Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 286/KPTS/1997 tentang penetapan status ruas-ruas jalan sebagai jalan Kabupaten dan jalan kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta			BAPPEDA	Yogyakarta	1997	Ruas-ruas jalan
1230	REG 302 Kep -		Keputusan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 19 tahun 2001 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) tahun 2001 di Propinsi DIY			Dinas pendapatan daerah	Yogyakarta	2001	Pajak kendaraan bermotor
1231	REG 302 Him -		Himpunan peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1998 tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor			Dinas pendapatan daerah	Yogyakarta	1998	Pajak kendaraan bermotor

REGULATION

1232	REG 351 Lem p		Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir no. 29 tahun 2002 tentang rencana strategi (RENSTRA) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2001-2005		BAPPEDA	Rokan hilir	2002	Rencana strategi
1259	REG 351 Men k		Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 tahun 2001 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Tahun 2001		Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Jakarta	2001	Keputusan Penghitungan Dasar
1260	REG 320 Per -		Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau		Perda Propinsi Tingkat I Riau	Riau	2001	Peraturan Daerah
1263	REG 340 Pem -		Keputusan wali kota madaya kepada daerah tingkat II Yogyakarta nomor 47 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Yogyakarta nomor 9 tahun 1998 tentang pajak reklame		Pemerintah kotamadya daerah tingkat II Yogyakarta	Yogyakarta	1999	Pajak reklame
1264	REG 308.34 Per -		Peraturan daerah Propinsi jawa barat		Pemerintah Propinsi jawa barat	Jawa Barat	2003	Pembangunan daerah
1265	REG 335.34 Kep -		Keputusan gubernur dareah istimewa Yogyakarta nomor 114 tahun 2000 tentang standarisasi harga barang dan jasa pemerintah Propinsi daerah istimewa Yogyakarta		Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	2000	Standarisasi harga
1268	REG 351 Bup k		Keputusan bupati toba samosir nomor: 71 tahun 2002 tentang harga standard barang/pralatan untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten toba samosir tahun anggaran 2002		Pemerintah Kabupaten toba samosir	Balige	2002	Harga standard
1269	REG 621.34 Pem -		Peraturan daerah Propinsi daerah istimewa Yogyakarta nomor 10 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum di Propinsi daerah istimewa Yogyakarta		Pemerintah Propinsi daerah istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	2001	Angkutan jalan
1271	REG 624 Pem r		Lampiran peraturan daerah Propinsi sumatera barat nomor tahun 2001 tentang rencana strategis pemerintah Propinsi sumatera barat tahun 2001-2005		Pemerintah Propinsi sumatera barat	Padang	2001	Rencana strategis
1274	REG 351 Und -		UU 17/2003 tentang keuangan negara		BAPPENAS	Jakarta	2003	Keuangan negara
1283	REG 308 Lem -		Peraturan daerah Kabupaten rokan hilir nomor 30 tahun 2002 tentang program pembangunan daerah (PROPEDA) Kabupaten rokan hilir tahun 2001-2005		Pemerintah Kabupaten rokan hilir	Rokan hilir	2002	Pembangunan daerah
1291	REG 352 Per -		Peraturan daerah Propinsi nusa tenggara barat nomor 2 tahun 2001 tentang program pembangunan lima tahun daerah (PROPEDA) Propinsi nusa tenggara barat tahun 2001-2005		BAPPEDA	Mataram	2001	Pembangunan daerah
1293	REG 720 Per -		Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta no. 6 tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta		PEMDA Tingkat II Yogyakarta	Yogyakarta	1994	Tata ruang Kota
1301	REG 350 Kep -		Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Departemen Perhubungan tahun 2000-2004		Menteri Perhubungan	Jakarta	2004	RENSTRA DEPHUB
1308	REG 378 Kep -		Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan strategis nasional ilmu pengetahuan dan teknologi		Kementerian riset dan teknologi	Jakarta		Kebijakan strategis
1311	REG 620.4 Per -		Peraturan pemerintah no. 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi		BAPPENAS	Jakarta	2000	Peraturan pemerintah
1312	REG 620 Per -		Peraturan pemerintah no. 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi		BAPPENAS	Jakarta	2000	Peraturan pemerintah

REGULATION

1323	REG 311 Sta -		Statistik Indonesia. Statistical year book of indonesia 2002			Badan Pusat Statistik	Jakarta	2002	Statistik indonesia
1325	REG 351 Kep -		Keputusan Gubernur Riau nomor: KPTS. 87/III/2001 tentang penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2001. Belanja pembangunan			Pemerintah Propinsi riau	Pekanbaru	2001	Anggaran pendapatan dan belanja
1326	REG 346 Gub -		Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 182 tahun 2003 tentang program langit biru di Propinsi daerah istimewa Yogyakarta			BAPPEDA	Yogyakarta	2003	Keputusan gubernur
1327	REG 620 Kep -		Keputusan menteri pekerjaan umum nomor:67/KPTS/1998 tentang petunjuk praktis pengendalian pelaksanaan proyek di bidang pekerjaan umum untuk para pemimpin proyek/bagian proyek			BAPPENAS	Jakarta	1998	Keputusan menteri pekerjaan umum
1328	REG 720 Per -		Peraturan daerah Propinsi banten nomor: 36 tahun 2002 tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi banten tahun 2002-2007			BAPPEDA	Banten	2002	Rencana tata ruang
1334	REG 351 Lem -		Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 29 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2001-2005			Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Rokan hilir	2002	Peraturan daerah
1337	REG 352 Kep -		(Kepres RI. no. 80 tahun 2003) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Fokusmedia	Jakarta	2003	Pengadaan barang dan jasa
1338	REG 720 Ran -		Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: . . . Tahun2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)			Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional	Jakarta	2004	Peraturan pemerintah